

Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabaya

Novy Yandari Nurlaily¹, Satria Unggul Wicaksana^{2*}, Rudi Irmawanto³, Iis Holisin⁴
^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, ³Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surabaya, ⁴Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: novy.yandari02@gmail.com¹, satria@fh.um-surabaya.ac.id²,
rudi.irmawanto@um-surabaya.ac.id³, iisholisin.pendmat@fkip.um-surabaya.ac.id⁴

*Corresponding author: Satria Unggul Wicaksana

Info Artikel

Kata Kunci:

Akses Pendidikan, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Pinggiran Perkotaan

Keywords:

Access to Education, Human Rights, Suburban Society

Abstrak

Konsiderans menimbang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara gamblang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan. Pemerataan akses pendidikan bagi setiap anak merupakan keniscayaan yang menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pemerataan akses pendidikan ini dinyatakan sebagai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dituliskan dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Salah satu prinsip pemerataan pendidikan yang diselenggarakan adalah penyelenggaraan pendidikan untuk mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung bagi setiap warga negara seperti yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Berdasarkan amanat yang diberikan oleh kedua pasal tersebut, jurnal ini menganalisis sejauh mana tanggung jawab para penyelenggara pendidikan termasuk orang tua, guru, dan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang merata bagi setiap warga negara termasuk masyarakat pinggiran perkotaan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada SD Budi Yakin yang terletak di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Fokus penelitian ini adalah pada penyelenggaraan pendidikan di SD Budi Yakin untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Rentang waktu penelitian diambil selama 2 bulan dalam tahun 2021 sebagai batas waktu pengambilan data. Pengambilan data dilakukan dengan metode observasi langsung dan wawancara sehingga penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa penyelenggaraan pendidikan di pinggiran Kota Surabaya yang direpresentasikan oleh SD Budi Yakin ternyata kurang optimal. Solusi atas permasalahan tersebut telah dipaparkan melalui program dan kegiatan yang dijalankan oleh penulis sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini.



Abstract

The consideration in Law Number 20 of 2003 clearly states that the national education system must be able to guarantee equal distribution of educational opportunities.

Equitable access to education for every child is a necessity that is a responsibility that must be fulfilled by the government. Equitable access to education is stated as the responsibility of the government and local governments as written in Article 11 paragraph 1 of Law Number 20 of 2003. One of the principles of equal distribution of education is the provision of education to develop reading, writing, and arithmetic skills for every citizen, as mandated in article 4 paragraph 5 of Law No. 20 of 2003. Based on the mandate given by the two articles, this journal analyzes the extent to which the responsibilities of education providers including parents, teachers, and the government in providing equal education for everyone citizens, including suburban communities. This research is a case study research at Budi Yakin Elementary School which is located in Tambaksari District, Surabaya City. The focus of this research is on providing education at SD Budi Yakin to develop reading, writing, and arithmetic skills. The research time span was taken for 2 months in 2021 as the time limit for data collection. Data collection was done by direct observation and interviews so that this research can be classified as qualitative research. From this study, it was found that the implementation of education on the outskirts of the city of Surabaya represented by SD Budi Yakin was not optimal. Solutions to these problems have been presented through programs and activities carried out by the author as described in this study.

PENDAHULUAN

Untuk mendukung upaya pemerataan akses pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat 1 yang tertulis bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”, maka diperlukan komitmen dari setiap penyelenggara pendidikan terutama pemerintah, guru, dan orang tua untuk meningkatkan kualitas layanan dan kemudahan akses pendidikan bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Diskriminasi dalam ruang lingkup pendidikan tidak hanya mencakup diskriminasi suku, agama, ras, maupun anatomi tubuh. Isu kritis di bidang pendidikan di Indonesia diantaranya mengenai perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta upaya mengatasi kesenjangan sarana dan prasarana antara wilayah (Mashudi, 2019). Karena hak untuk mendapatkan pendidikan dijamin oleh konstitusi (Heymann, Raub, & Cassola, 2014).

Diskriminasi di dalam ruang lingkup pendidikan dapat dielaborasi lebih luas lagi hingga mencakup persoalan tata ruang perkotaan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Josef, 1996) bahwa perkotaan adalah suatu wilayah yang melingkupi tiga aspek utama di dalamnya yakni jumlah dan kepadatan penduduk, heterogenitas, serta terakhir adalah pola kegiatan. Lebih lanjut, suatu kota yang baik adalah yang mampu memfungsikan

secara analitis masing-masing aspek penyusunnya terutama dalam hal kegiatan. Kegiatan di sini meliputi kegiatan pelayanan umum yang salah satu kegiatan utamanya adalah kegiatan pendidikan.

Masyarakat di daerah pinggiran kota (rural maupun *hinterland* dari suatu kota), memiliki kecenderungan untuk tidak mendapatkan akses yang cukup terhadap kegiatan penyelenggaraan pendidikan di suatu kota. Hal ini dikarenakan secara praktis, pengelola kota menurut (Josef, 1996) cenderung memusatkan kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan ini di wilayah pusat kota. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran kota mengalami diskriminasi sebagai konsekuensi riil dari ketimpangan pembangunan perkotaan. Untuk itu, muncullah istilah eksklusi sosial yang kemudian digunakan untuk menjelaskan peristiwa diskriminasi berupa ketimpangan akses pendidikan bagi masyarakat di pinggiran perkotaan.

Eksklusi sosial secara konsep adalah ketimpangan yang dirasakan oleh sekelompok orang tertentu sebagai akibat dari kebijakan pembangunan dan perekonomian yang tidak memihak mereka. Akibatnya, sekelompok orang tersebut harus tersisihkan atau tereksklusi dari program-program sosial yang secara wajar seharusnya dapat mereka peroleh. Di dunia pendidikan, konsep eksklusi sosial yang terkait dengan pendidikan mulai dikenal pada tahun sekitar tahun 2010-an. Salah satu teori yang memaparkan dengan baik tentang eksklusi sosial di dalam dunia pendidikan disampaikan oleh (Apple, 2012) yang mana menurutnya eksklusi sosial di dunia pendidikan adalah disparitas yang terbentuk dari ketidakberpihakan agenda pembangunan perekonomian yang menyebabkan seseorang yang berasal dari kelompok orang tertentu tidak dapat mengakses secara penuh kegiatan-kegiatan pendidikan akibat dari kondisi alamiah yang dimiliki orang tersebut. Kondisi alamiah ini dapat meliputi ras seperti contohnya eksklusi sosial bagi warga kulit hitam dalam mendapatkan pendidikan, kemudian agama seperti contohnya eksklusi sosial bagi warga penganut muslim di Bosnia dan Herzegovina untuk mendapatkan akses penuh pendidikan, anatomi seperti contohnya para penyandang disabilitas yang tidak dapat menjalankan pendidikan secara penuh layaknya pelajar lainnya, hingga lokasi tempat tinggal yang dalam konteks ini dapat dilihat seperti pada masyarakat pinggiran perkotaan yang tereksklusi dalam mendapatkan pendidikan.

Terkait dengan persoalan eksklusi sosial di dunia pendidikan (Zahid Zulfiqar, 2020) memaparkan bahwa terdapat tiga faktor determinan yang menciptakan eksklusi di bidang pendidikan yang secara umum dapat ditemui dalam kasus-kasus lain, yakni:

1. Jarak rumah ke sekolah, termasuk kondisi tempat tinggal apakah di wilayah rural, *hinterland*, atau pusat kota yang menentukan jarak rumah ke sekolah;
2. Kualitas pengajar, termasuk perbedaan antara pengajar di wilayah pinggiran kota dengan pusat kota;



3. Peran dari orang tua dalam mendukung keberlangsungan pendidikan bagi anak-anaknya.

Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama menentukan tingkat aksesibilitas pendidikan dan menunjukkan disparitas pendidikan antara masyarakat yang ada di pinggiran kota dengan masyarakat yang ada di pusat kota.

Mengetahui hal-hal tersebut, didasarkan pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa pendidikan haruslah bersifat tidak diskriminatif. Pendidikan dalam konteks penelitian ini adalah penyelenggaraan kegiatan yang berprinsip untuk memperbaiki kualitas keterampilan membaca, menulis, dan berhitung dari peserta didik sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat 5 UU Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia secara umum meliputi jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Sebagaimana diungkapkan oleh (Siraj, I., Taggart, B., Melhuish, E., Sammons, P., & Sylva, 2014) pendidikan dasar (*primary school/elementary school*) adalah tahapan awal bagi peserta didik untuk mengenal dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan secara lebih dalam. Penyelenggaraan pendidikan pada tingkatan pendidikan dasar yang baik menentukan karakteristik dari peserta didik pada tingkatan berikutnya. Hal ini dikarenakan pada tingkatan pendidikan dasar ini lah ditanamkan karakter-karakter dasar seorang pembelajar untuk memahami ilmu pengetahuan (Devkota, S. P., & Bagale, 2015). Penyelenggaraan pendidikan dasar yang baik adalah kunci terselenggaranya pendidikan secara keseluruhan.

Untuk itu, perlu diperhatikan bahwa apakah memang betul penyelenggaraan pendidikan dasar di Kota Surabaya telah sesuai dan tidak bersifat diskriminatif terhadap masyarakat yang tinggal di pinggiran Kota Surabaya. Hal ini juga berkaitan dengan eksklusivitas dalam dunia pendidikan, di mana masyarakat yang tinggal di pinggiran kota cenderung lebih susah untuk mendapatkan akses pendidikan. Jurnal ini menganalisis permasalahan terkait penyelenggaraan pendidikan di pinggiran Kota Surabaya, tepatnya di SD Budi Yakin yang terletak di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di SD Budi Yakin dalam meningkatkan kualitas keterampilan membaca, menulis, dan berhitung dari para peserta didiknya.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif menurut (Silverman, 2006) merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis data yang tidak dapat direpresentasikan melalui angka-angka dan dihitung berdasarkan perhitungan statistik. Penelitian kualitatif ini pada umumnya ditujukan untuk bungenangka. Lebih lanjut bahkan Silverman (2006) menyatakan bahwa seorang peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif

harus mengambil pemahaman bahwa teknik yang digunakan dalam penelitian kuantitatif bukanlah satu-satunya cara untuk menetapkan validitas temuan dari penelitian. Pemahaman ini utamanya berkaitan dengan analisis statistik yang bagi peneliti pemula dianggap sebagai satu-satunya metode untuk mendapatkan validitas temuan dalam penelitian (Gunawan, 2013)

Menurut (Silverman, 2006) sejumlah praktik yang berasal dari penelitian kuantitatif mungkin tidak sesuai untuk penelitian kualitatif. Hal ini dapat dilihat tentang sejauh mana peran dari penelitian kualitatif dalam menganalisis topik-topik yang berkaitan dengan fenomena sosial, khususnya yang mengandung interpretasi atas pemikiran individu (Bungin, 2007). Untuk itu penting bagi seorang peneliti memasukkan asumsi bahwa penelitian ilmu sosial nyatanya dapat memperoleh validitas penelitian lebih baik jika berdasarkan definisi operasional variabel, data eksperimen, statistik resmi, atau pengambilan sampel populasi secara acak dan melalui interpretasi data terukur sebagai representasi fakta sosial yang valid atau dapat digeneralisasikan berdasarkan teori-teori tertentu yang digunakan sebagai landasan analisis.

Sementara itu, karena dalam penelitian ini menyangkut fenomena sosial yang secara khusus menekankan pada satu kasus unik yang terjadi pada fokus satu topik tertentu. Dalam hal ini, kasus unik yang diangkat dalam penelitian ini terkait dengan sistem penyelenggaraan pendidikan di suatu lembaga penyelenggara pendidikan dasar di pinggiran perkotaan. Tepatnya adalah pada SD Budi Yakin yang terletak di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Untuk itu, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Pendekatan studi kasus menurut (Gunawan, 2013) termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang menjabarkan satu kasus unik secara holistik dan deskriptif. Penelitian studi kasus berfokus pada satu peristiwa tertentu dalam ruang lingkup tertentu untuk kemudian dilakukan analisis secara mendalam hingga tuntas dan dilakukan secara cermat. Kasus yang diangkat dapat berfokus pada suatu individu atau kelompok tertentu, suatu batasan spasial tertentu, dan suatu jangka waktu tertentu yang terjadi. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tertentu tersebut sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu kesimpulan yang akurat.

(Nawawi, 2003) mengemukakan bahwa “data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber”. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Dalam penelitian ini, data didapatkan dari analisis terhadap penyelenggaraan pendidikan di SD Budi Yakin yang diperoleh melalui observasi langsung selama 2 bulan dan melalui wawancara terhadap para penyelenggara pendidikan mulai dari guru, orang tua, hingga pihak lain yang berperan di dalam penyelenggaraan pendidikan di SD Budi Yakin.

Proses observasi lapangan dipilih sebagai metode pengumpulan data karena menurut (Nawawi, 2003) dalam mempelajari studi kasus, metode observasi memberikan gambaran terperinci tentang satu kasus unik dalam kerangka fenomena sosial yang ingin



diamati. Selain itu, dalam metode observasi langsung di lapangan peneliti terlibat secara aktif di dalam penelitian sehingga peneliti berkedudukan sebagai subjek penelitian. Dengan hadirnya peneliti secara langsung di lapangan maka peneliti dapat melihat secara langsung proses yang terjadi di SD Budi Yakin. Validitas data hasil dari observasi langsung juga dikatakan lebih valid ketimbang metode pengumpulan lainnya.

Sebagai dasar untuk melakukan triangulasi sumber data, penulis kemudian menggunakan metode pengumpulan data lainnya yakni wawancara. Melalui wawancara peneliti dapat mengambil *insight* lebih dalam terkait topik yang sedang diamati. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di SD Budi Yakin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan secara setara. Keberadaan eksklusivitas di dunia pendidikan adalah bentuk diskriminasi di dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut (Apple, 2012) problematika penyelenggaraan pendidikan yang muncul dari adanya eksklusivitas pendidikan adalah dasar dari segala bentuk eksklusi sosial yang terjadi di kehidupan berikutnya. Hal ini berarti bahwa adanya eksklusi sosial di dunia pendidikan merupakan pangkal permasalahan yang harus ditebang dan segera diatasi. Bentuk dari eksklusi sosial di dunia pendidikan ini sendiri dapat diakibatkan oleh berbagai macam variabel. Variabel penyebab eksklusi sosial di dunia pendidikan ini dapat meliputi suku, ras, agama, etnis, jenis keluarga dan kondisi tempat tinggal.

Lebih lanjut (Apple, 2012) menyebutkan bahwa eksklusi sosial menciptakan disparitas dalam hal akses pendidikan bagi seseorang yang berasal dari kelompok masyarakat tertentu. Labelisasi atau stereotipe terhadap seseorang yang berasal dari kelompok masyarakat tertentu menjadi faktor determinan yang menciptakan kesenjangan antar identitas sosial di masyarakat. Reproduksi pembagian kelas dimulai ketika pendidikan menghadirkan perbedaan kelas berdasarkan label sosial yang dimiliki oleh seseorang. Mereka yang berkulit putih, berkulit hitam, berkulit kuning, berasal dari ras melayu, berasal dari kaukasian, pemeluk islam, pemeluk kristen, pemeluk yahudi, semuanya terbagi ke dalam kelas sosial sejak adanya disparitas kelas yang diciptakan oleh pendidikan dengan eksklusi sosial di dalamnya.

Secara spesifik (Zahid Zulfiqar, 2020) memaparkan bahwa terdapat tiga faktor determinan yang menciptakan eksklusi di bidang pendidikan yang secara umum dapat ditemui dalam kasus-kasus lain, yakni:

1. Jarak rumah ke sekolah, termasuk kondisi tempat tinggal apakah di wilayah rural, *hinterland*, atau pusat kota yang menentukan jarak rumah ke sekolah;

2. Kualitas pengajar, termasuk perbedaan antara pengajar di wilayah pinggiran kota dengan pusat kota;
3. Peran dari orang tua dalam mendukung keberlangsungan pendidikan bagi anak-anaknya.

Hasil penelitian tersebut didapatkan dari observasinya pada pelajar di tiga distrik Multan, Dera Ghazi Khan and Bahawalpur yang berada di wilayah Pakistan. Penelitian tersebut dilakukan selama rentang waktu satu tahun ajaran pada tahun 2016. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa:

1. Dari keseluruhan responden, 55,3% mengalami eksklusi sosial di dunia pendidikan. Sebesar 55,3% responden tersebut mengalami eksklusi sosial karena mereka tinggal di wilayah pinggiran kota dengan jarak ke sekolah lebih dari 2,5 kilo meter dan pendapatan keluarga di bawah PKR 21.000 (Rp 1.930.000) setiap bulannya;
2. Dari total 900 responden, 64,3% di antaranya mengalami eksklusi sosial di dunia pendidikan karena kondisi sekolah yang berada di pinggiran kota memiliki kualitas pengajar kurang baik jika dibandingkan dengan pusat kota. Kurang baik di sini dapat diartikan bahwa para pengajar sering kali mengeluarkan kata kasar dan mendidik menggunakan kekerasan fisik yang berdampak pada buruknya prestasi pendidikan dan mental anak;
3. Dari keseluruhan responden, 73,5% di antaranya mengalami eksklusi sosial karena orang tua mereka tidak mengizinkan mereka bersekolah dan tidak memedulikan perkembangan pendidikan bagi anak-anak mereka.

Eksklusi sosial yang dimaksud oleh (Zahid Zulfiqar, 2020) ini meliputi segala bentuk diskriminasi termasuk mengenai aksesibilitas pendidikan yang tidak merata, kualitas pendidikan yang timpang, ketidakmampuan untuk mendapatkan pendidikan, hingga tidak adanya perhatian lebih terhadap para peserta didik dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan (Symaco, 2013).

Salah satu contoh penyelenggara pendidikan yang berada di wilayah pinggiran kota adalah Sekolah Dasar Budi Yakin. Sekolah Dasar Budi Yakin terletak di Jalan Rangkah Besar No.20, RT.001/RW.04, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Sekolah Dasar Budi Yakin terletak di wilayah Surabaya Timur yang merupakan wilayah di pinggir Kota Surabaya. Sekolah Dasar Budi Yakin berada di bawah pengelolaan Yayasan SD Budi Yakin dengan nomor SK Pendirian No.244 Tanggal 18 Desember dan tanggal SK Pendirian 1 Juli 1976. Yayasan SD Budi Yakin sendiri terletak di Lebak Jaya IV/42, Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dengan diketuai oleh Bapak Siswanto, S.Pd.I. Sedangkan untuk SK Izin Operasional, SD Budi Yakin saat ini memiliki SK Izin Operasional Nomor 422/0013/436.6.4/2013 dengan tanggal tercantum pada SK Izin Operasional adalah 1910-01-01.



Secara total, SD Budi Yakin pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 memiliki 6 guru, 1 orang tenaga pendidik, dengan 55 peserta didik. Kepala sekolah dari SD Budi Yakin saat ini adalah Tatik Faridah. Dari 6 guru yang dimiliki oleh SD Budi Yakin, 1 orang adalah guru laki-laki dan 5 orang sisanya adalah guru perempuan. Satu orang tenaga pendidik di SD Budi Yakin adalah perempuan. Penghitungan total antara guru dan tenaga pendidik dihitung per tanggal 20 Mei 2021, di mana yang dihitung adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk. Dari total 55 orang



peserta didik, 29 orang di antaranya adalah siswa laki-laki sedangkan 26 di antaranya adalah siswi perempuan. Keseluruhan peserta didik dibagi ke dalam 6 rombongan belajar yang melaksanakan kegiatan di 7 ruang kelas, 1 ruang pimpinan, 1 ruang guru, dan 2 ruang toilet. Secara lebih jelas, peta dari SD Budi Yakin dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1. Peta Citra Satelit SD Budi Yakin

Mengacu pada teori eksklusi pendidikan yang disampaikan oleh (Zahid Zulfiqar, 2020) serta tambahan satu indikator yang disampaikan oleh (Apple, 2012) yakni faktor segregasi sosial di dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Sehingga di dalam penelitian ini digunakan empat indikator untuk mendapatkan hasil terkait ada atau tidaknya eksklusi pendidikan di SD Budi Yakin. Indikator pertama yakni indikator terkait dengan jarak rumah siswa ke sekolah. Hal ini biasa disebut dengan sistem zonasi (Arifuddin, 2019 ; Marini, 2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa serta guru didapatkan fakta bahwa jarak paling jauh antara rumah siswa dengan SD Budi Yakin adalah sekitar 4 kilometer. Para orang tua biasanya biasanya mengizinkan anaknya untuk pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda kayuh. Jika jarak yang ditempuh cukup jauh bagi seusia anak SD dengan menggunakan sepeda kayuh, maka para orang tua akan mengantarkan anaknya ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan para guru dan pengurus sekolah, diketahui bahwa tujuan utama dari didirikannya SD Budi Yakin oleh Yayasan SD Budi Yakin adalah untuk membantu masyarakat di sekitar Rangkah khususnya bagi masyarakat yang secara penghasilan berada di bawah rata-rata penghasilan wajar untuk

mendapatkan akses ke sekolah dengan lebih dekat. Keberadaan SD Budi Yakin selama ini dinilai oleh para guru, pengurus, dan masyarakat sekitar sangat membantu anak-anak di sekitar untuk dapat bersekolah dengan baik. Sehingga SD Budi Yakin mayoritas peserta didiknya adalah anak-anak yang berada di sekitar sekolah, dengan radius tidak lebih dari 4 kilometer dari sekolah.

Berdasarkan hasil observasi langsung pun diketahui bahwa anak-anak yang bersekolah di SD Budi Yakin tidak ada yang mengeluh terkait dengan jarak. Secara keseluruhan anak-anak yang bersekolah di SD Budi Yakin berangkat dan pulang sekolah menggunakan sepeda kayuh atau pun diantar jemput oleh orang tuanya. Dari hasil ini diketahui bahwa eksklusivitas pendidikan di SD Budi Yakin tidak terindikasi jika dinilai menggunakan indikator jarak antara rumah ke sekolah. Ketiadaan anak-anak maupun orang tua yang mengeluh terkait jarak membuat eksklusivitas di SD Budi Yakin tidak tampak dari hasil indikator jarak rumah ke sekolah (Darwis, 2020). Justru berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa SD Budi Yakin meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.

Sedangkan indikator kedua terkait dengan kondisi sekolah dan kualitas pengajar yang berkaitan dengan hasil atau prestasi belajar para siswa, diketahui bahwa kualitas pendidikan di SD Budi Yakin secara sarana dan prasarana belajar sesuai dengan standar yang ditetapkan, namun untuk prestasi belajar dan kualitas pengajar perlu ditingkatkan dengan program-program yang lebih inklusif. Hal ini didapatkan setelah penulis melakukan kegiatan pengamatan langsung di SD Budi Yakin.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan penulis selama 2 bulan di SD Budi Yakin, diketahui bahwa kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta menghafal dari para siswa masih kurang. Banyak peserta didik yang kesulitan untuk memahami konsep dasar perhitungan pada matematika. Selain itu, beberapa peserta didik juga diketahui masih kesulitan untuk menghafal atau memahami pelajaran yang diberikan. Secara kemampuan membaca pun diketahui sebelumnya minat baca di SD Budi Yakin sangat kurang. Rendahnya minat baca dari peserta didik di SD Budi Yakin ditengarai atas sebab ketiadaan fasilitas perpustakaan atau pojok baca di SD Budi Yakin. Untuk penggunaan teknologi pun beberapa peserta didik juga masih kesulitan untuk mengoperasikan teknologi dasar yang diperlukan dalam proses pembelajaran.

Dari segi kualitas pengajar, SD Budi Yakin memiliki 6 orang guru dan 1 orang tenaga pendidik. Rasio antara jumlah tenaga pengajar (termasuk tenaga pendidik) dengan jumlah murid adalah 1:8 atau berarti 1 tenaga pengajar bertanggung jawab terhadap 8 murid. Jumlah ini termasuk efektif untuk penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar. Jumlah ideal berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah 1:29. Namun jika mengingat banyaknya mata pelajaran yang harus diampu oleh satu orang tenaga pengajar, maka rasio guru dengan murid dikatarakan belum efektif. Tiap guru dibebani pengajaran terhadap terlalu banyak tema dan mata pelajaran sehingga jalannya



pendidikan menjadi tidak kondusif karena guru banyak yang merasa letih ketika mengajar.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini, penulis terjun langsung dengan beberapa program pengajaran harian yang dilaksanakan secara total 2 bulan. Hasilnya, untuk setiap mata pelajaran setidaknya hasil pendidikan di SD Budi Yakin semenjak ada penulis dari kampus mengajar sejauh ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Keberadaan mahasiswa termasuk penulis di SD Budi Yakin banyak membantu perkembangan pendidikan terkini termasuk perkembangan teknologi, maupun perkembangan administrasi pada guru-guru yang ada di SD Budi Yakin. Secara hasil prestasi belajar pun terdapat cukup banyak peningkatan signifikan dari siswa SD Budi Yakin.

Indikator ketiga yakni terkait dengan peran dan partisipasi orang tua siswa dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di SD Budi Yakin. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru yang mengajar, diketahui bahwa sebagian besar orang tua terutama yang berasal dari kalangan dengan penghasilan di bawah rata-rata kurang memerhatikan jalannya pendidikan anak-anak mereka di SD Budi Yakin. Para guru berharap bahwa orang tua murid harus lebih aktif dan responsif terhadap perkembangan pendidikan anak-anaknya. Berdasarkan penuturan guru dan tenaga pengajar, diketahui pula bahwa banyak orang tua yang masih belum sepenuhnya menganggap bahwa pendidikan adalah hal yang utama bagi generasi muda.

Berdasarkan hasil observasi lapangan pun diketahui bahwa masih banyak sekali orang tua siswa yang tidak memperdulikan anaknya ketika sekolah maupun ketika mengerjakan tugas. Banyak peserta didik yang tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Penyebabnya adalah peserta didik ini tidak didampingi oleh orang tuanya ketika belajar di rumah. Selain itu, dari penuturan siswa pribadi ketika dilakukan *profiling* para peserta didik diketahui bahwa sebagian besar siswa merasa tidak mendapat perhatian yang cukup ketika bersekolah karena kedua orang tuanya sibuk bekerja. Bahkan beberapa peserta didik menuturkan bahwa beberapa orang tua mereka secara tidak langsung juga menganggap bahwa sekolah maupun tidak sekolah mereka tidak peduli.

Terakhir, terkait dengan segregasi sosial di dalam penyelenggaraan pendidikan, diketahui bahwa di SD Budi Yakin tidak ditemukan adanya segregasi sosial. Sistem penyelenggaraan pendidikan pada suatu rombongan belajar di SD Budi Yakin didasarkan pada sistem meritokrasi. Sehingga bisa dikatakan terkait dengan segregasi sosial tidak ditemukan adanya eksklusivitas pendidikan di SD Budi Yakin.

Dua dari empat indikator ini merupakan satu contoh implisit dari eksklusivitas pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran. Menurut (Devkota, S. P., & Bagale, 2015) eksklusivitas di ranah pendidikan tidak hanya terjadi pada faktor sosial seperti etnis, suku, agama, maupun faktor ekonomi. Namun, faktor geografi dapat menjadi salah satu bentuk eksklusivitas di dunia pendidikan. Ketidakadilan dalam dunia pendidikan yang berkaitan dengan faktor geografi hadir dalam bentuk terkonsentrasinya unit pendidikan yang berkualitas di satu wilayah tertentu. Hal ini tampak dari hasil yang

didapatkan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di SD Budi Yakin yang notabene merupakan SD di wilayah pinggiran Kota Surabaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa di SD Budi Yakin ditemukan dua indikator dari total empat indikator yang digunakan untuk menggambarkan keberadaan eksklusi sosial di dalam dunia pendidikan. Kedua indikator yang menunjukkan keberadaan eksklusivitas pendidikan di SD Budi Yakin adalah indikator terkait dengan kualitas pengajar dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa, serta indikator peran serta orang tua dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anaknya. Melalui kegiatan observasi lapangan yang dilakukan diketahui bahwa secara kualitas pengajar di SD Budi Yakin perlu adanya perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengajar di suatu sekolah yang berada di pinggiran kota masih mengalami ketimpangan dengan kualitas pengajar di suatu sekolah yang terletak di pusat kota. Secara prestasi belajar pun menunjukkan bahwa kualitas pengajar berkorelasi dengan prestasi belajar para siswa. Ini membuat para siswa yang bersekolah di sekolah pinggiran perkotaan memiliki keterampilan belajar yang kalah dengan siswa di pusat kota. Untuk peran serta orang tua pun diketahui bahwa faktor tuntutan ekonomi menjadi alasan utama orang tua untuk tidak begitu memedulikan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anaknya di suatu sekolah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat pinggiran kota yang cenderung memiliki penghasilan di bawah rata-rata memiliki tingkat atensi dan partisipasi lebih rendah dibandingkan dengan orang tua yang memiliki penghasilan lebih tinggi dan menyekolahkan anaknya di pusat kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Apple, M. W. (2012). Some Lessons in Educational Equality. *Educational Researcher*, 41(6). <https://doi.org/10.3102/0013189x12449379>
- Arifuddin, dkk. (2019). Sistem Zonasi Antara Realita dan Harapan. In *Prosiding Seminar Nasional Pagelaran Pendidikan Dasar Nasional (PPDN)*, (Vol. 1, No. 1, pp. 372-383).
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Penerbit Kencana.
- Darwis, A. (2020). *Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi di Tinjau Dari Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. (Doctoral dissertation; Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Devkota, S. P., & Bagale, S. (2015). SOCIAL EXCLUSION, SCARCITY AND EDUCATION. *Journal of New Horizons in Education*, 5(2), 46., 5(2), 46.
- Gilbert, Alan dan Gugler, Josef. 1996. *Cities, Poverty and Development, Urbanization in the Third World*. Oxford: Oxford University Press.



- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Heymann, Jody Cassola, A. (2012). *Making Equal Rights Real*.
- Heymann, J., Raub, A., & Cassola, A. (2014). Constitutional rights to education and their relationship to national policy and school enrolment. *International Journal of Educational Development*, 39. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.08.005>
- Marini, K. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeeri di Kota Bandar Lampung. *Society*, 2(1).
- Mashudi, A. (2019). Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.31538/ndh.v4i2.327>
- Nawawi, H. H. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*.
- Silverman, D. (2006). *Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction*.
- Siraj, I., Taggart, B., Melhuish, E., Sammons, P., & Sylva, K. (2014). *Exploring effective pedagogy in primary schools: Evidence from research*. London, Great Britain: Pearson (eng).
- Symaco, L. P. (2013). Geographies of social exclusion: education access in the Philippines. *Comparative Education*, 49(3). <https://doi.org/10.1080/03050068.2013.803784>
- Zahid Zulfiqar, D. (2020). Determinants of Educational Exclusion of Children: A Study of Southern Punjab, Pakistan. *Sjesr*, 3(2). [https://doi.org/10.36902/sjesr-vol3-iss2-2020\(91-98\)](https://doi.org/10.36902/sjesr-vol3-iss2-2020(91-98))